

### Formulasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))	Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen pengukuran oleh Kementerian Hukum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola regulasi, deregulasi, dan penguatan sistem hukum di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian ini bertujuan menciptakan regulasi yang bersih, akuntabel, dan mendukung investasi, dengan fokus pada harmonisasi, kompetensi perancang peraturan, dan pemutakhiran data hukum.	Indeks Reformasi Hukum diperoleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan indikator penilaian sebagai berikut : 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%); 2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (legal drafter) pusat yang berkualitas (bobot 25%); 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 35%); 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%)	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah	90-100
	Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	Indeks Kualitas Kebijakan diperoleh dari penilaian LAN RI dengan menilai kebijakan yang disusun dalam kurun waktu 3 tahun sebelum tahun pengukuran dan telah berlaku efektif 1 tahun dalam	Kerangka instrumen IKK terdiri dari 2 dimensi yaitu Dimensi Perencanaan Kebijakan dan dimensi Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan. Dimensi ini kemudian terbagi atas 4 Sub dimensi, 13 indikator dan 39 pertanyaan.	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah	(Nilai) 80.00-90.99

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
		bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Adapun nilai akhir IKK terdiri dari predikat sebagai berikut : 1. 91.00 - 100 predikat Unggul 2. 80.00 - 90.00 predikat Sangat Baik 3. 65.00 - 79.99 predikat Baik 4. 50.00 - 64.99 predikat Cukup 5. < 50.00 predikat Kurang			
Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Nilai LPPD (Nilai)	Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah skor hasil evaluasi pusat terhadap kinerja pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam satu tahun anggaran. Penilaian mencakup capaian kinerja makro (IPM, kemiskinan, pengangguran) serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Penghitungan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. dan berdasarkan skor kinerja yang diperoleh, maka disusun rangking kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota. Penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan kedalam 5 (lima) klasifikasi. Nilai LPPD berdasarkan EKPPD: NO Skor Kinerja Status Kinerja 1. 1.00-1.80 Sangat Rendah 2. 1.81-2.60 Rendah 3. 2.61-3.40 Sedang 4. 3.41-4.20 Tinggi 5. 4.21-5.00 Sangat Tinggi	Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah	3.41-4.20
	Nilai SAKIP Komponen	Komponen pelaporan kinerja dalam SAKIP mengukur transparansi dan	Nilai Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen dari penilaian	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah	11,7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
	Pelaporan Kinerja (Nilai)	akurasi laporan kinerja (LKjIP) untuk memastikan pertanggungjawaban serta umpan balik perbaikan. Penilaian difokuskan pada keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan laporan, dengan bobot yang signifikan dalam evaluasi tahunan. Laporan ini harus memuat realisasi kinerja terhadap target.	SAKIP. Bobot Maksimal dalam penilaian Pelaporan Kinerja adalah 15. Penilaian Pelaporan Kinerja dilakukan oleh Tim Evaluator Kemenpan RB			
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah indikator kinerja yang ditetapkan LKPP untuk mengukur tingkat kematangan, profesionalisme, dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah. ITKP merupakan bagian penting dari evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencakup aspek SDM, kelembagaan, dan pemanfaatan sistem elektronik (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak)	Indeks Tata Kelola Pengadaan yang diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia dengan indikator penilaian sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang terdiri dari SiRUP, E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat), E-Purchasing, Non E- Tendering & Non E-Purchasing dan E-Kontrak (bobot 30%) ; 2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) (bobot 30%); 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (bobot 40%).	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris Daerah	90.01-99.99

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab	Target Tahun 2026
Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Nilai SKM (Nilai)	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) adalah hasil kuantitatif dari survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan tujuan sebagai tolok ukur perbaikan mutu pelayanan oleh instansi pemerintah	Nilai SKM diperoleh berdasarkan hasil kompilasi dari seluruh nilai SKM Perangkat Daerah. Dimana dalam pelaksanaannya SKM mempedomani Permenpan 14 Tahun 2017 yakni menilai 9 unsur dari proses penyelenggaraan layanan pada masing-masing Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah	88.31-100
	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM) adalah nilai yang menunjukkan persentase capaian mutu layanan dasar yang berhak diterima setiap warga negara, hasil dari perkalian persentase capaian mutu dengan bobot pelayanan dasar. Indeks ini menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam urusan wajib (pendidikan, kesehatan, PU, perumahan, sosial, trantibumlinmas) sesuai Permendagri 59/2021.	IP SPM diperoleh dari Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan indikator penilaian sebagai berikut: 1. Indeks Pencapaian Mutu Pelayanan Dasar (bobot 20 %); 2. Indeks pencapaian Penerima Pelayanan Dasar (bobot 80 %)	Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah	99.01-100

Denpasar, 2 Januari 2026  
 Pt. Sekretaris Daerah Kota Denpasar



Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19680924 199303 1 010